

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD
GOVERNANCE TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

OLEH
ARIYANTO TAHIR
NIM.S.21.16.152

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

2

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

ARIYANTO TAHIR
S21.161.52

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Ujian, Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Ichsan Gorontalo

Dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo,.....2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Fatma M Ngabito, S.IP, M.Si
NIDN : 0924128301

Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP
NIDN. 0924076701

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP
NIDN. 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

ARIYANTO TAHIR
S21.161.52

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat yang disetujui oleh
Pembimbing pada tanggal.....

TIM PENGUJI

1. Dr. Arman, M.SI
2. Sandy Prahara S.T.,M.Si
3. Noviyanti Tue, S.Ip.,M.Si
4. Fatmah M Ngabito, S.IP, M.Si
5. Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

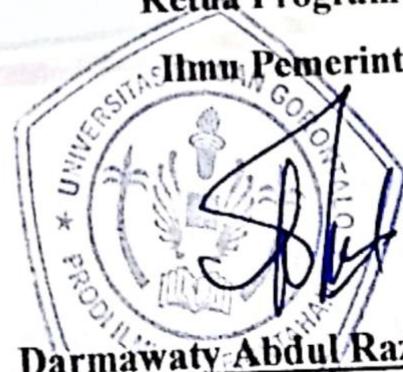
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu



Dr. ARMAN, M.SI
NIDN. 09130788602

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP
NIDN. 0924076701

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariyanto Tahir
Nim : S2116152
Program Studi : ilmu pemerintahan
Fakultas : ilmu social dan ilmu politik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi Yang Berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap kinerja Pegawai Di Kantor Camat Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara” adalah benar-benar Asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah diduplikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naska dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedi menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



Juli 2020

ABSTRAK

Apriyanto Tahir, Nim S2116152. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pembimbing 1. Fatma M Ngabito, S.IP, M.Si, Pembimbing 2. Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP

Penelitian ini adalah penelitian jenis kuantitatif, menggunakan analisis data Path Analysis. Hasil penelitian adalah ;Tidak terdapat pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa transparansi (X1) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara, Terdapat pengaruh pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa akuntabilitas (X2) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara, Terdapat pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa efisiensi dan efektifitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara, Terdapat pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan efisiensi dan efektifitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci : Good Governance, Fungsi DPRD

ABSTRACT

Apriyanto Tahir, Nim S2116152. The Effect of the Application of the Principles of Good Governance on the Implementation of the Functions of the Regional People's Representative Council in North Gorontalo District. Advisor 1. Fatma M Ngabito, S.IP, M.Si, Advisor 2. Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP

This research is a quantitative type of research, using Path Analysis data analysis. The results of the study are; There is no influence between the application of the principles of good governance in the form of transparency (X1) on the implementation of the functions of the DPRD in North Gorontalo Regency. between the application of the principles of good governance in the form of efficiency and effectiveness (X3) on the implementation of DPRD functions in North Gorontalo District, there is an influence between the application of the principles of good governance in the form of transparency (X1), accountability (X2), and efficiency and effectiveness (X3) on the implementation of DPRD functions. in North Gorontalo District.

Keywords: *Good Governance, DPRD Function*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan ijin dan kuasanya Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara**" sampai dengan selesai.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna Memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.penulis menyadari dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dibutuhkan dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak,usulan penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan.oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

Muh.Ichsan Gafar.SE.,M.Ac selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ichsan gorontalo,Bapak DR.Abdul Gaffar Latjokke,M.Si.,sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,Bapak DR.Arman,S,Sos.,M.Si, sebagai dekan fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Marten Nusi,.S.IP.,M.AP., Sebagai ketua

program Studi Ilmu Pemerintahan pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Fatma M.Ngabito,S.IP.,M.Si sebagai Koordinator Kampus Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus sebagai pembimbing 1, Ibu Darmawati Abdul Rajak S.IP.,M.AP selaku pembimbing 2, dan Ibu Novianti Tue,S.IP.,M.Si Selaku dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Bapak/Ibu staf Dosen Pengajar di Lingkungan Unversitas Ichsan Gorontalo Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis.

Ucapan terimakasih kepada bapak Ismail Tahir Dan Ibu Halima Buka merupakan orang tua dari penulis serta keluarga yang telah membantu secara moril dan materil secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penulisan ini.

Meskipun banyak kendala dalam penyusunan skripsi ini akan tetapi, tidak mengurangi semangat penulis untuk selalu menyelesaikan skripsi ini, dengan arahan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu, skripsi ini tidak akan selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamuallaikum warohmatullahi wabarakattuh

Gorontalo, Juli 2020

Ariyanto Tahir
Nim : S2116152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan masalah	7
1.3.Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	10
2.1.Konsep <i>Good Governance</i>	10
2.2 Prinsip <i>Good Governance</i>	18
2.2.Pelaksanaan <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik	20
2.3.Konsep DPRD	25
2.4.Konsep Pelayanan Publik.....	31
2.5.Kerangaka Pemikiran.....	34
2.6.Hipotesis Penelitian	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Latar dan Waktu Penelitian	42
3.2. Metode Penelitian	42
3.2.1 jenis penelitian	42
3.2.2. jenis data dan variabel penelitian	42
3.2.3. populasi dan sampel	43
3.2.4.teknik pengumpulan data	44
3.2.5. prosedur penelitian	44
3.2.6. transformasi data	46
3.2.7. rancangan uji hipotesis	47
3.2.8. teknik pengolahan dan analis data.....	49
BAB IV BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.3 Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
1.1.Kesimpulan.....	74
1.2.Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel Interpensi Nilai	50
Tabel 4.1 jawaban Responden.....	58
Tabel 4.2.3 Uji Hipotesis secara simultan antara variabel X1,X2,dan X3terhadap Y	72
Tabel 4.2.4 Uji Hipotesis secara persiel antara variabel X1,X2,dan X3terhadap Y	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangak pikir.....	34
Gambar 2 Struktur Path analisys	48
Gambar 3 Struktur Organisasi	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era pembangunan sekarang ini merupakan elemen yang sangat penting. Aspek aspek tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas yaitu dimana pertanggung jawaban dari penyelenggara pemerintahan sangat dituntut dalam bidang pelayanan publik ataupun yang lainnya. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari pelaksananya. Pada dasarnya prinsip akuntabilitas jika dilaksanakan dengan baik akan menghindari terjadinya tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi dan lain lain. Dengan pertanggung jawaban yang baik dengan sendirinya akan memberikan kinerja yang sesuai dengan visi, misi organisasi sesuai aturan yang berlaku.

Akuntabilitas mewajibkan pertanggungjawaban , yaitu pertanggungjawaban dari para pelaksana pemerintahan baik pelayanan public ataupun bidang bdang yang berhubungan dengan pemerintahan, antara lain bidang politik. Adapun tolok ukurnya bahwa kinerja yang dilakukan bisa dikatakan layak dikatakan memenuhi persyaratan pertanggungjawaban yang , dilihat dari segi ekonomis dan keuangan. Akuntabilitas ini jika dilakukan dengan benar bisa menghindari adanya korupsi dan kinerja organisasi bisa mewujudkan tujuan organisasi.

Selanjutnya birokrasi, yang dimaksud dengan birokrasi adalah unsur sumberdaya manusia sebagai pelaksana sistem administrasi pemerintahan. Dalam hal ini birokrasi merupakan bagian penting guna mewujudkan clean government dan good governance. Peranan birokrasi begitu kuat sebab disamping berdampak perekonomian juga pada politik. Pada perekonomian, kinerja birokrasi berakibat terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Pada politik, kinerja birokrasi berimbang pada legitimasi masyarakat kepada pemerintah.

Berkurangnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan menyebabkan munculnya konsepnya good governance. Penerapan prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu konsep pemerintahan berdemokrasi yang adil. Demi tercapainya tujuan ini dibutuhkan peran dan fungsi DPRD supaya eksekutif dapat melakukan tugasnya secara benar. DPRD merupakan lembaga berfungsi sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan supaya berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Adanya kontrol dari DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat yang merupakan mitra lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan meminimalisir adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini peran DPRD sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melihat fungsi DPRD sangat besar peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana DPRD sebagai mitra lembaga pemerintahan, hal ini merupakan fenomena yang sangat penting diketahui untuk mengetahui apakah dengan menerapkan prinsip good governance bisa mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD. Untuk alasan inilah maka penulis penelitian ini, yaitu dengan judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kota Gorontalo Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalahnya yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi (X1) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Akuntabilitas (X2) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Efisiensi dan Efektivitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara?
4. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Efisiensi dan Efektivitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk menganalisis data mengenai Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi (X1) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Akuntabilitas (X2) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Efisiensi dan Efektivitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Efisiensi dan Efektivitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk praktisi. Sebagai bahan masukan bagi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan prinsip *good governance* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2. Untuk akademisi

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pengembangan ilmu administrasi, khususnya mengenai pengembangan konsep *good governance* dan kualitas pelayanan publik.

3. Untuk peneliti

Sebagai bahan referensi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam upaya pengembangan ilmu Administrasi dan yang akan meneliti lebih lanjut mengenai konsep *good governance*.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Good Governance*

Istilah *good governance* menurut Dwi Payana (2010:45) “merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis, dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama”. Berbagai definisi *good governance* (Dwi Payana, 2010:47) “*good governance*” di artikan sebagai kepemerintahan yang baik”.

Dwipayana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2009:122) “*governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata-kelola kepemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata-kelola kepemerintahan tak sehat-*bad governance*”.

Definisi lain menyebutkan “*governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa di dalam masyarakat

terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda". (Rochman, 2007:197).

Lembaga Administrasi Negara (2009:47) "memberikan pengertian *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat".

Disisi lain, Adisasmita (2011:22) "mengatakan bahwa goverance memiliki tiga penyangga, yaitu economic, social, dan administrative, *Economic goverance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada *stakeholders*.
3. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (*Responsiveness*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Berorientasi konsensus (*Consensus orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Selanjutnya Sedarmayanti (2009:6) memberikan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada:
 - a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstitusinya seperti: legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability (akuntabilitas),

securing of human rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control.

- b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Adapun Natakusumah (2007:32) “ mengatakan bahwa *good governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan kehidupan pemerintahan. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat”.

Kemudian menurut Effendi dalam Surjadi (2009:19) “*government* dan *governance* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara, *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara”.

Selanjutnya menurut Kaloh (2009:172) “secara teoritis *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan

hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum”.

2.2 Prinsip *Good Governance*

Menurut Adisasmita (2011:38) “tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance adalah transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas”. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal.

1. Transparansi

“Secara ringkas dapat diuraikan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan”.

Laporan keuangan yang merupakan produk akuntansi untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

2. Akuntabilitas

Tuntutan akuntabilitas merupakan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya, akuntabilitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu untuk tahu, hak untuk diberi infomasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tentang pelaporan keuangan pemerintah.

3. Efisiensi dan efektivitas

Dalam konteks otonomi daerah, efisiensi dan efektivitas merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Efisiensi dan efektivitas tersebut harus diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan akuntansi sektor publik yang baik.

Akuntansi sektor publik dibutuhkan sejak tahap perencanaan. Peran akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program, berapa biaya suatu aktivitas dan evaluasi kinerja periode sebelumnya sehingga berdasarkan informasi tersebut pemerintah dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisiensi dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas atau proyek. Sistem akuntansi sektor publik yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendekati program-program yang tidak layak secara ekonomi.

2.3 Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma *rule government* (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (*out put*), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunaan paradigma *rule government* atau pendekatan legalitas, dewasa ini

cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Menurut Widiatmoko, (2007:9) “penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah, paradigma *good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan”.

Menurut Widiatmoko, (2007:9) “libatkan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena mereka yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, libatkan masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) terhadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan”.

Menurut Widiatmoko,(2007:9) “penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik

di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik”.

Menurut Widiatmoko, (2007:9) “Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan”.

Menurut LAN, (2006:21) “beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis, dan menjadi prioritas sebagai *kunci masuk* untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia, salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan *good governance*, dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah, buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik”.

Menurut Widiatmoko, (2007:14) “Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah, selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik”.

Menurut Widiatmoko, (2007:14) “Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”.

Menurut LAN, (2006:23) “Paradigma *good governance*, dewasa ini masuk di dalam pikiran sebagian besar *stakeholder* pemerintahan di pusat dan daerah, dan menumbuhkan semangat pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mamajemen pemerintahan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Banyak pemerintah daerah yang telah mengambil langkah-langkah positif didalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*".

Menurut LAN, (2006:23) "Paradigma *good governance* menjadi relevan dan menjawab kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap mental, perilaku aparatur penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas".

2.4 Konsep DPRD

Menurut Laksono Fajar Dan Subarjo, (2006) "Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif, kekuasaan legislatif tidak boleh di jadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani, kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang, keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara".

Menurut Armen Yasir, (2010) "Sebagai lembaga legislatif DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat perundang-undangan, melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, Undang-Undang Dasar dan undang-

undang mengatur hak prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan hak atas perubahan (Raperda), kemampuan lembaga legislatif melaksanakan fungsi perwakilan dan fungsi legislasi dapat dilihat dari persepsi para anggota dalam mengangkat berbagai persoalan dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum legislatif atau kemampuan lembaga legislatif melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili”.

1. Fungsi-Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

a. Regulator.

Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);

b. Policy Making.

Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;

c. Budgeting. Perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

a. Fungsi Legislasi

Menurut Laksono Fajar Dan Subarjo, (2006) “Legislasi adalah kewenangan membentuk undang-undang (legislative power)”. Legislasi atau dalam bahasa Inggris “Legislation memiliki arti pembuatan perundang-undangan”. Sedangkan legislatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “adalah badan yang berwenang membuat undang-undang”.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- 1) Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
- 2) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- 3) Sebagai kontrak sosial di daerah;
- 4) Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai policy maker, dan bukan policy implementer di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders. Dalam praktik dan realita, proyeksi good public governance pada fungsi legislasi masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan:

- 1) Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;
 - 2) Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders;
 - 3) Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda;
 - 4) Ditingatkannya kemampuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan Raperda;
 - 5) Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi;
- b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, sebagai legitimator usulan APBD yang diajukan pemerintah daerah. Fungsi penganggaran memiliki makna pentingnya yaitu:

- 1) APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi);
- 2) APBD sebagai fungsi investasi daerah;
- 3) APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks good governance, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Adapun *good public governance* pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih berperan secara konkret apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal berikut:

- 1) Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:
 - 2) Efektifitas pembentukan jaring asmara;
 - 3) Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan;
 - 4) Pemberahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD;
 - 5) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA
 - 6) Penyusunan PPAS, antara lain:
 - a) Akuntabilitas terhadap nilai anggaran;
 - b) Kelengkapan data-data pendukung;
 - c) Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah
 - d) Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat
- c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan.

Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

- 1) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;

- 2) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- 3) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- 4) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

Namun demikian, praktik good public governance pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:

- 1) Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif;
- 2) Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
- 3) Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
- 4) Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
- 5) Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

2.5 Konsep Pelayanan Publik

Menurut Lukman, (2008:8) “Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pelayana sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani”.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara public”.

Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti “umum, masyarakat, negara”. Menurut Sinambela,(2012:5) “Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat, oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Menurut Sinambela, (2012:5)“mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara”. Menurut Sinambela, (2012:5) “Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada

hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat”.

Menurut Sinambela, (2012:6) “Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya, untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 62 tahun 2003 “tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

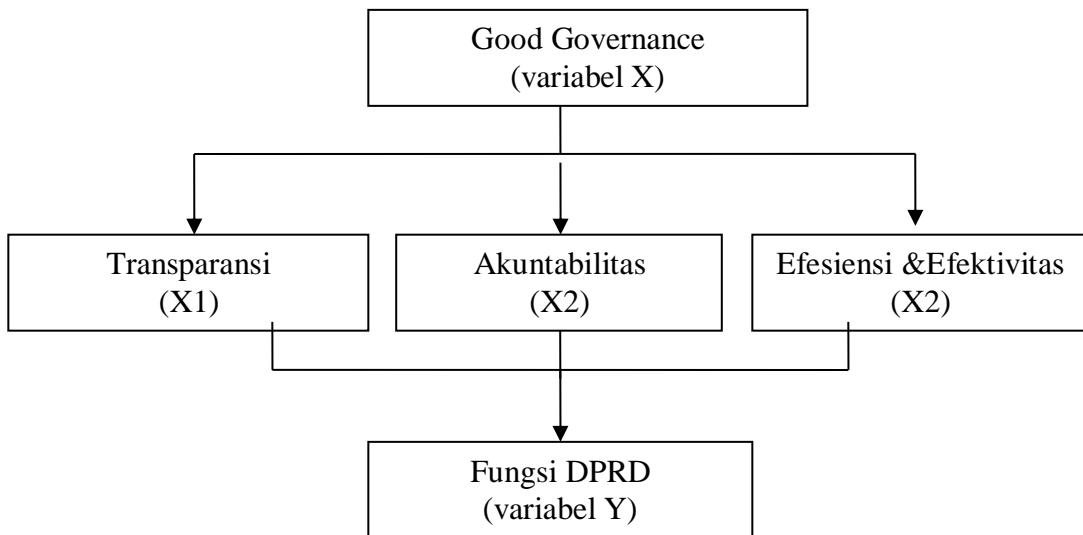
- 1) Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan yang mencakup :
 - a. Rincian biaya atau tarif pelayanan publik.
 - b. Prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif.
- 3) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

- 5) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 6) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih (2009:2)"mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan".

Menurut Moenir (2008:17) "pelayanan pada hakikatnya adalah serangkain kegiatan karena merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, kebutuhan manusia dan pelayanan digambarkan melalui teori *life cycle theory of leadership*".

2.6 Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi (X1) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Terdapat pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Akuntabilitas (X2) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Terdapat pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Efisiensi dan Efektivitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

4. Terdapat pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Efisiensi dan Efektivitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini “adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode observasional analitik dengan rancangan *Cross Sectional Study*, yaitu suatu rancangan penelitian yang mengkaji dinamika dan mengamati pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen pada saat bersamaan (*point time approach*)”.

3.2.2 Jenis Data dan Variabel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer, “yaitu data yang diperoleh dari responden”.
2. Data Sekunder, “yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen atau kepustakaan yang relevan dengan penelitian”.

Penelitian ini terdiri atas :

1. Variabel terikat (*dependent variable*)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independen

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

X3 = Efisiensi dan Efektivitas

3.2.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Teknik pengambilan sampel adalah sampel penelitian.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

1. Teknik Kuesioner

“Adalah teknik yang digunakan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kemudian dibagikan kepada semua responden untuk diisi dan dijawab sesuai dengan keadaan sebenarnya”.

2. Dokumentasi

“Yaitu mengumpulkan dan melakukan pengkajian atas data sekunder, seperti uraian tugas pokok dan mekanisme pengurusan”.

3. Observasi

“Yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui kuesioner, dengan melihat dan melakukan pengamatan langsung”.

3.2.5 Prosedur Penelitian

Sebelum data yang didapat dianalisa lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan uji terhadap instrumen pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat, yaitu uji Validitas dan uji Reliabilitas.

1. Uji Validitas

“Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, uji validitas ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana instrumen yang digunakan dapat betul-betul mengukur apa yang hendak diukur” (Ancok, 1997). Metode yang digunakan adalah “Korelasi *Product Moment* dengan cara mengkorelasikan skor jawaban pada setiap butir pertanyaan dengan skor total”

$$r_{xy} = \frac{N \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Di mana :

- r_{xy} = korelasi
- X = skor jawaban setiap item
- Y = skor total
- n = jumlah subjek uji coba

2. Uji Reliabilitas

“Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui keajekan kuesioner yang diberikan kepada responden dan indek yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan”.

Menurut Sugiyono (2002) “Untuk uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua yang maksudnya adalah butir-butir instrumen dibagi menjadi dua kelompok yaitu butir-butir instrumen yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi satu dan butir instrumen nomor genap dikelompokan

menjadi satu, kemudian masing-masing kelompok skor tiap butirnya dijumlahkan yang menghasilkan skor total. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya”.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach* (Nurgiyantoro, 2000) dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{k}{k - 1} \left[1 - \frac{\sum \sigma^2}{\sigma^2} \right]$$

Di mana :

r = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah butir pertanyaan

σ_i^2 = varian butir pertanyaan

σ^2 = varian skor tes

3.2.6 Transformasi Data

Mentransformasi “data ordinal menjadi data interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik setidaknya berskala interval, teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*)”. Menurut Riduwan (2012: 30) bahwa terdapat beberapa langkah transformasi data ordinal ke data interval sebagai berikut:

- a. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebarluaskan
- b. Pada setiap butir, tentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disebut sebagai frekuensi

- c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi
- d. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan proporsi secara berurutan perkolom skor
- e. Gunakan Tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh
- f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan Tabel Koordinat Kurva Normal
- g. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus

$$NS = \frac{Density at Lower Limit) - (Density at Upper Limit)}{(Area Below Upper Limit) - (Area Below Lower Limit)}$$

- h. Tentukan nilai transformasi dengan rumus

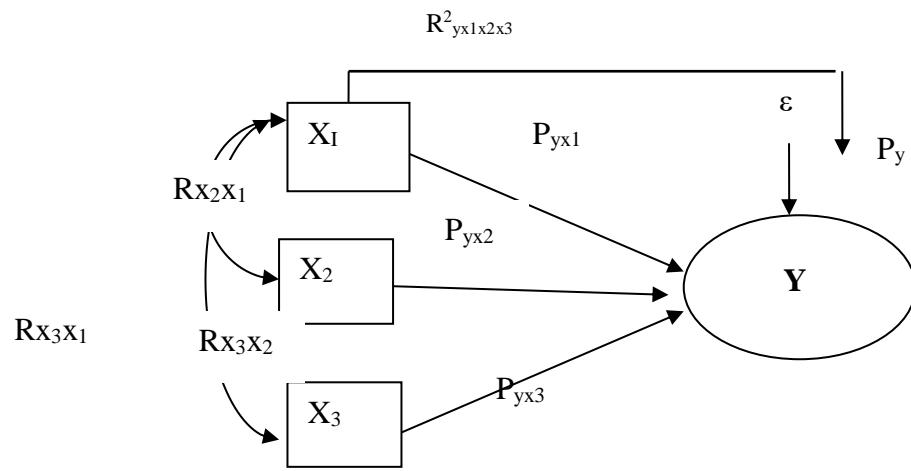
$$Y = NS + [1 + |NS_{min}|]$$

3.2.7 Rancangan Uji Hipotesis

Untuk memastikan variabel penelitian apakah ada pengaruh Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) dan Efisiensi dan Efektivitas (X3) secara simultan dan secara parsial terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Y), maka pengujian dilakukan dengan uji analisis jalur , dengan terlebih dahulu mengkonversi data skala ordinal ke skala interval . Analisa jalur (path analysis) dapat dilihat gambar berikut ini :

Pengujian dilakukan dengan uji analisis jalur, dengan terlebih dahulu mengkonversi data skala ordinal ke skala interval . Analisa jalur (path analysis) dapat dilihat gambar berikut ini :

Struktur Path analysys



$$Y = \rho_{YX_1} X_1 + \rho_{YX_2} X_2 + \rho_{YX_3} X_3 + \epsilon_2 \dots \text{Substruktural}$$

Keterangan :

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| X1 | = Transparansi |
| X2 | = Akuntabilitas |
| X3 | = Efisiensi dan Efektivitas |
| Y | = Pelaksanaan Fungsi DPRD |
| Σ | = Variabel lain yang mempengaruhi Y |

3.2.8 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1991) yaitu :

1. “Editing; memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang telah diterima dari responden. tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan dan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan”.
2. “Koding; mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori, dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban”.
3. “Tabulasi pekerjaan adalah pekerjaan membuat tabel jawaban. Jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan kedalam tabel”.

Data primer dikumpulkan dari pegawai dengan memakai kuesioner dan dibantu wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari pencatatan. Selanjutnya, setelah data terkumpul diberi kode dan dilakukan editing kemudian data dimasukkan dalam program pengolahan data SPSS.

Untuk menganalisa data agar sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, maka analisa data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

“Analisis univariat dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti yaitu pelatihan, kemampuan, kepemimpinan, dan kinerja petugas, analisa ini menyederhanakan kumpulan data dari

setiap variabel yang dijadikan informasi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase”.

2. Analisis Bivariat

“Analisis ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, sekaligus memunculkan uji statistik yang diperlukan. Untuk menguji hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan analisis korelasi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ”. Interpretasi dari nilai korelasi adalah sebagai berikut :

Nilai r	Kriteria Hubungan
0	Tidak ada korelasi
0 – 0,5	Korelasi lemah
0,5 – 0,8	Korelasi sedang
0,8 – 1	Korelasi kuat
1	Korelasi sempurna

3. Analisis Multivariat

“Analisis ini dilakukan dengan cara menghubungkan variabel independen yaitu pelatihan, kemampuan, dan kepemimpinan, pada waktu yang bersamaan. Dari analisis multivariat ini dapat diketahui variabel-variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis jalur”.

“Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda, teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangannya (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y ”. “Analisis jalur ialah suatu teknik untuk

menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung". (Robert D. Retherford 1993).

4. Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian "adalah kuesioner yang dihimpun dengan menggunakan daftar pertanyaan, dan setiap pertanyaan yang diajukan sebagai alat ukur dengan teknik skala likert dengan 5 skala tingkat" (Sugiyono, 1999), kemudian dibagi menjadi 2 (Baik dan Tidak Baik) dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Jawaban sangat baik diberi bobot 5
2. Jawaban baik diberi bobot 4
3. Jawaban cukup diberi bobot 3
4. Jawaban tidak baik diberi bobot 2
5. Jawaban sangat tidak baik diberi bobot 1

Setiap jawaban diberi skor numerik (angka), untuk melakukan kategorisasi variabel independen dan variabel dependen maka dilakukan perhitungan nilai akumulasi setiap responden. Frekuensi nilai jawaban tertinggi dan terendah dijumlahkan dan selanjutnya mencari nilai median untuk memperoleh kategori sangat baik, baik, cukup, tidak baik dan sangat tidak baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip Good Governance berupa Transparansi yang disimbolkan (X1), Akuntabilitas yang disimbolkan (X2), dan Efisiensi dan efektifitas yang disimbolkan (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten Gorontalo Utara. Sebelum pembahasan tentang

uji hipotesis, terlebih dahulu dianalisis sevcara deskriptif masing-masing variabel sebagai berikut.

4.1.1 Deskripsi Variabel Penerapan prinsip Good Governanace berupa Transparansi

Variabel penerapan prinsip good governance berupa transparansi dianalisis dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam defenisi operasional variabel penelitian. Indikator penelitian ini diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan seperti yang terdapat dalam lampiran I. Hasil jawaban responden terhadap pertanyaan (kuesioner) dianalisis dengan menggunakan program SPSS ver.25 seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tanggapan Responden tentang Anggota Dewan telah menjalankan prinsip *Chek and Balances* berupa keseimbangan pengawasan terhadap kewenangan yang diberikan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	18	72,0
5	Sangat Setuju	7	28,0
Total		25	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 tentang anggota dewan telah melaksanakan fungsinya dengan memperhatikan prinsi chek anf balance yaitu kesimbanangan prngawasan terhadap kewenangan yang diberikan. Dari 25 responden, terdapat 18 orang atau 72%

yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 7 orang atau 28% lainnya menyatakan sangat setuju. Dengan demikian anggota dewan kabupaten Gorontalo Utara secara umum telah melaksanakan fungsi dengan mempertimbangkan prinsi pengawasan terhadap kewenangan yang diberikan. Berikutnya adalah tabel yang menjelaskan tentang tanggungjawaban dan kemampuan anggota dewan seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Tanggapan Responden bahwa Semua Dewan telah memiliki Rasa Tanggungjawab dan kemampuan yang Profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	3	12,0
4	Setuju	17	68,0
5	Sangat Setuju	5	20,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 tentang pelaksanaan fungsi dewan dengan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 17 orang atau 68% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 5 orang atau 20% yang menyatakan sangat setuju, dan 3 orang atau 12% lainnya yang menyatakan kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya anggota dewan kabupaten Gorontalo Utara memiliki kemampuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Tabel berikutnya adalah pendapat responden tentang kesadaran akan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.3 Tanggapan responden bahwa Semua Anggota Dewan Sadar akan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	4	16,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 tentang kesadaran anggota dewan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21 orang atau 84% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 4 orang atau 16% yang menyatakan sangat setuju. Dengan demikian secara umum anggota dewan telah memiliki rasa empati dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.4 Tanggapan Responden bahwa Semua Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan diri pribadi atau membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	18	72,0
5	Sangat Setuju	7	28,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 tentang tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari anggota dewan seperti perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, perbuatan yang membebani masyarakat, atau perbuatan yang menguntungkan diri secara finansia. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 18 orang atau 72% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 7 orang atau 28% lainnya yang sangat setuju. Dengan demikian secara umum anggota dewan Kabupaten Gorontalo Utara telah memiliki etika dan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penerapan Prinsip Good Governance Berupa Akuntabilitas

Variabel penarapan prinsip good governance berupa akuntabilitas dianalisis dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam defenisi operasional variabel. Indikator penelitian tersebut selanjutnya dibuatkan beberapa pertanyaan seperti pada lampiran I. Hasil jawaban responden dalam kuesioner selanjutnya dianalisis dengan menggunakan program SPSS Ver.25 seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Tanggapan Responen bahwa semua prosedur dalam pelaksanaan fungsi anggota dewan dapat diakses oleh masyarakat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	19	76,0
5	Sangat Setuju	6	24,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 tentang pelayanan publik yang diberikan oleh anggota dewan seperti prosedur pelayanan dapat diakses dengan mudah. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 19 orang atau 76% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 6 orang atau 24% yang menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek akses terhadap prosedur pelayanan di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara berjalan dengan efektif.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Bahwa Semua Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Aspirasi Masyarakat telah Disosialisasikan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	18	72,0
5	Sangat Setuju	5	20,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 tentang pelayanan publik yang dilakukan anggota dewan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 18 orang atau 72% yang menyatakan setuju, 5 orang atau 20% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan kurang setuju. Dengan demikian aspirasi masyarakat telah menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan fungsi anggota dewan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden bahwa Semua Anggota Dewan tidak Pilih Kasih dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	19	76,0
5	Sangat Setuju	4	16,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 tentang anggota dewan dalam menjalankan fungsinya tidak diskriminatif dan bersifat adil dalam melayani masyarakat. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 19 orang atau 76% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 4 orang atau 16% yang sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.8 Tanggapan Responden bahwa semua Anggota Dewan Bertanggungjawab terhadap janji politik yang disampaikan saat pencalonan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	19	76,0
5	Sangat Setuju	6	24,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa dalam menjalankan fungsinya, anggota dewan bertanggungjawab terhadap realisasi janji politik yan disampaikan pada saat kampanye. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 19 orang atau 76% yang menyatakan setuju dan 6 orang atau 24% lainnya yang menyatakan sangat setuju. Dengan demikian pada umumnya janji politik anggota dewan di Kabupaten Gorontalo telah menjadi pertimbangan dalam menyusun program.

4.1.3 Variabel Penerapan Prinsip Good Governance Berupa Efisiensi dan Efektifitas

Variabel penerapan prinsip good governance berupa efisiensi dan efektifitas dianalisis dengan menggunakan indikator penelitian yang telah ditetapkan dalam definisi operasional. Indikator penelitian selanjutnya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk diberikan kepada responden. Hasil pengumpulan data melalui kuesioner dianalisis dengan menggunakan program SPSS Ver.25 seperti yang disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.9 tanggapan Responden bahwa dimasa jabatan mereka telah terselenggaran pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	17	68,0
5	Sangat Setuju	6	24,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 bahwa anggota dewan telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 17 orang atau 68% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 24 orang atau 6% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% yang menyatakan kurang setuju. Dengan demikian pada umumnya anggota dewan dalam menjalankan fungsinya telah

memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.10 Tanggapan responden bahwa semua proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	15	60,0
5	Sangat Setuju	8	32,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 bahwa semua proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 15 orang atau 60% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 8 orang atau 32% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% yang menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.11 Tanggapan Responden bahwa pengalokasian sumber daya keuangan telah mengadopsi sistem informasi akuntasi yang akurat, relevan, dan handal dalam menghitung besaran biaya program kegiatan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	2	8,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 bahwa dalam pengalokasian sumber daya keuangan telah mengadopsi sistem informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan handal dalam menghitung besaran biaya program kegiatan. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21 orang atau 84% yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 2 orang atau 8% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alokasi keuangan dalam menopang program kegiatan telah berpedoman kepada sistem akuntansi publik yang handal dan dapat dipercaya.

Tabel 4.12 Tanggapan Responden proses penganggaran telah mengadopsi Sistem Akuntansi Sektor Publik

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	4	16,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 bahwa penganggaran yang dilakukan telah mengadopsi sistem akuntansi sektor publik. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21 orang atau 84% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 4 orang lainnya menyatakan sangat setuju. Dengan demikian penganggaran di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara telah mengadopsi sistem akuntansi sektor publik.

4.1.4 Variabel Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Variabel pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dianalisis dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam defenisi operasional penelitian. Indikator penelitian selanjutnya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan seperti pada lampiran I. Hasil pengumpulan data melalui kuesioner dianalisis dengan menggunakan program SPSS ver.25 seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Tanggapan Responden bahwa mekanisme fungsi anggota dewan telah menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana program pembangunan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	18	72,0
5	Sangat Setuju	5	20,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020 □

Hasil tabulasi data pada tabel 4.13 tentang mekanisme fungsi anggota dewan telah menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana program pembangunan. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 18 orang atau 72% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 5 orang atau 20% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.14 Tanggapan Responden bahwa disetiap ada penyimpangan atau penyelewengan dilakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	2	8,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil tabulasi data pada tabel 4.14 bahwa setiap ada penyimpangan akan dilakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21 orang atau 84% yang menyatakan setuju, 2 orang atau 8% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.15 Tanggapan Responden bahwa pelaksanaan fungsi anggota dewan telah menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan bahkan peniadaan penyimpangan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	2	8,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data pada tabel 4.15 bahwa pelaksanaan fungsi anggota dewan telah menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan bahkan peniadaan penyimpangan. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21% yang menyatakan setuju, 2 orang atau 8% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya juga menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.16 Tanggapan responden bahwa pelaksanaan fungsi anggota dewan sebagai bagian dari jaminan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	22	88,0
5	Sangat Setuju	3	12,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data yang disajikan pada tabel 4.16 bahwa pelaksanaan fungsi anggota dewan sebagai bagian dari jaminan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 22 orang atau 88% yang menyatakan setuju dan 3 orang atau 12% lainnya yang menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.17 Tanggapan Responden bahwa semua anggota dewan telah berusaha meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dalam menjalankan fungsi legislasi

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	17	68,0
5	Sangat Setuju	6	24,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data yang disajikan pada tabel 4.17 bahwa semua anggota dewan telah berusaha meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dalam menjalankan fungsi legislasi. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 17 orang atau 68% yang

menyatakan sangat setuju, 6 orang atau 24% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.18 Tanggapan Responden bahwa semua anggota dewan telah mengoptimalkan fungsi dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	15	60,0
5	Sangat Setuju	8	32,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data yang disajikan pada tabel 4.18 bahwa semua anggota dewan telah mengoptimalkan fungsi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dari 25 responden dalam penelitian terdapat 15 orang atau 60% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 8 orang atau 32% yang menyatakan sangat setuju, dan 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.19 Tanggapan Responden bahwa semua anggota dewan telah menumbuhkan inisiatif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	2	8,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data yang disajikan pada tabel 4.19 bahwa semua anggota dewan telah menumbuhkan inisiatif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda). Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21 orang atau 84% yang

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 2 orang atau 8% yang menyatakan sangat setuju, 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.20 Tanggapan Responden bahwa semua anggota dewan telah meningkatkan kemampuan analisisnya dalam bentuk bintek tentang proses penyusunan ranperda

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	21	84,0
5	Sangat Setuju	4	16,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data yang disajikan pada tabel 4.20 bahwa semua anggota dewan telah meningkatkan kemampuan analisisnya dalam bentuk bimbingan teknis yang diadakan secara berkala. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 21 orang atau 84% yang menyatakan setuju, 4 orang atau 16% yang menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.21 Tanggapan responden bahwa semua anggota dewan telah memahami dengan baik tentang fungsi legislasi

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	2	8,0
4	Setuju	16	64,0
5	Sangat Setuju	7	28,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil olahan data pada tabel 4.21 bahwa semua anggota dewan telah memahami dengan baik tentang fungsi legislasi. Dari 25 responen dalam penelitian, terdapat 16 orang atau 64% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 7 orang atau

28% yang menyatakan sangat setuju dan 2 orang atau 8% lainnya yang menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.22 Tanggapan responden bahwa adanya kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan masyarakat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	0	0
3	kurang Setuju	0	0
4	Setuju	17	68,0
5	Sangat Setuju	8	32,0
Total		25	100,0

Sumber : Olahan Data Kuesiner, 2020

Hasil analisis data yang disajikan pada tabel 4.22 bahwa sudah terdapat kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan masyarakat secara riil. Dari 25 responden dalam penelitian, terdapat 17 orang atau 68% yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 8 orang atau 32% yang menyatakan sangat setuju.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Uji Hipotesis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis tentang pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara baik pengaruh secara simultan maupun pengaruh secara parsial. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode path analysis atau analisis jalur. Hasil analisis data seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.23 Uji Hipotesis Secara Simultan antara Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,875 ^a	,765	,732	3,05193	,765	22,840	3	21	,000

Sumber : Hasil Analisis Data Melalui SPSS Ver.25, 2020

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan pada tabel 4.23 bahwa nilai f_{hitung} sebesar 22.840 sedangkan nilai F_{tabel} 4.570. dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$. Makna dari persamaan tersebut adalah hipotesis penelitian dapat diterima bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara penerapan prinsip good governance berupa transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan Efisiensi dan Efektifitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi pada DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun besarnya pengaruh dari ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,765 atau 76,5%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2) dan efisiensi

dan efektifitas (X3) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pada DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 4.24 Uji Hipotesis secara parsial antara Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,530	3,115		2,738	,012
	X1	-,265	,775	-,074	-,342	,736
	X2	1,162	,778	,392	1,494	,150
	X3	1,570	,405	,605	3,881	,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Analisis Data melalui SPSS ver 25, 2020

Hasil analisis data yang disajikan pada tabel 4.24 bahwa nilai t_{hitung} pada variabel transparansi (X1) adalah 0,342, nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas (X2) adalah 1,494, sedangkan nilai t_{hitung} variabel efisiensi dan efektifitas (X3) adalah 3,881 sedangkan nilai tabel adalah 0,878. Dengan demikian penerapan prinsip good governance berupa transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Variabel Akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, dan variabel Efisiensi dan Efektifitas (X3) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya mengukur seberapa besar pengaruh secara parsial antara ketiga variabel tersebut terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai beta pada variabel transparansi (X1) adalah sebesar -0,074 atau -7,4%, sedangkan nilai beta pada variabel akuntabilitas (X2) adalah sebesar 0,392 atau 39,2%, sedangkan nilai beta variabel efisiensi dan efektifitas (X3) adalah 0,605 atau 60,5%. Dengan demikian variabel transparansi (X1) sebesar -7,4% terhadap pelaksanaan fungsi DPRD,

variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh sebesar 39,2% terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, dan Variabel efisiensi dan efektifitas (X3) berpengaruh sebesar 60,5%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan dan analisis data pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa transparansi (X1) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara

2. Terdapat pengaruh pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa akuntabilitas (X2) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Terdapat pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa efisiensi dan efektifitas terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara
4. Terdapat pengaruh antara penerapan prinsip good governance berupa transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan efisiensi dan efektifitas (X3) terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan fungsi DPRD berupa fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi, maka sebaiknya memperhatikan akuntabilitas dan efisiensi dan efektifitas yang merupakan bagian dari penarapan prinsip good governance.

2. Bagi penelitian yang tertarik dalam mengkaji pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disarankan untuk mengkaji kembali fungsi transparansi sebagai wujud dari penerapan prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2010. *Membangun Good Governance*. PT. RajaGrafindo Pustaka. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia. 2006. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. LAN. Jakarta.

- Lukman, Sampara. 2008. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press. Jakarta.
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Muluk, Khairul. 2013. *Paradigma Baru Administrasi Publik: Dari “Public Management” Menuju “Public Governance”*. Jurnal Vol. V, No. 1, September 2012-Februari 2013.
- Natakusumah, Achmad D. 2007. *Implementasi Good Governance*. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten.
- Purnama, Nursya'bani. 2008. *Manajemen Kualitas, Perspektif Global*. EKONISIA. Yogyakarta.
- Ratminto, dan Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Riduwan, 2009. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Riduwan. 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Tesis*. Pengantar :Prof. Dr.Buchari Alma,Alfabeta. Bandung
- Rochman, Meuthia Ganie. 2007. “*Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalam buku *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga*. Komnas HAM. Jakarta.
- Santosa, Pandji.2008. *Administrasi Publik dan Aplikasi Good Governance*. PT. Reflika Aditama. Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Strategi Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Sinambela, L. Poltak. 2012. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarno. 2008. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT Refika Aditama. Bandung.

Syakrani, dan Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Widiatmoko, Hening. 2007. *Pelayanan Publik melalui Pendekatan Sistem dalam Penerapan Ekologi Administrasi Publik*. LAN RI. Jakarta.

Dokumen:

Keputusan MenPan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. KemenPan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang *Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara. Jakarta.

UNDP. 1997. *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian
- ❖ Semangatlah dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan keinginan yang sudah kita impikan

)

PERSEMBAHAN

- Untuk bapak Ismail Tahir Dan Ibu Halima Muka Tercinta Yang setia dengan Doa untuk anakmu
- Untuk adik-adikku Wahyu Tahir Dan Shintia Tahir Tersayang



LEMBAR KONTROL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARIYANTO TAHIR

NIM : S21.161.52

Fakultas/Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN

Kelas : NON REGULER

NO	HARI / TANGGAL	PEMBI MBING	MATERI KONSULTASI DAN CATATAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1	03/12/2019.	I	Cerptase Ke. pembacaan Laporan.	J. Tahir
2	05/01/2020	I	Pada Bab W. Mulai dari sejauh berdirinya wpt. fikiran. dan alih.	J. Tahir
3	20/01/2020	I	Pada Point Pembacaan, Pemahaman fisika dan Fisika.	J. Tahir
4	17/06/2020.	I	fisika Penilaian,	J. Tahir
5	01/07/2020.	I	Pembuktikan teori dan sejauh dengan penerapan Natura.	J. Tahir
6	05/06/2020	II	Langkah pengolahan data	J. Tahir
7	03/03/2020	II	pembuktikan Prof. IV pembahasan cara pengolahan dan tanya.	J. Tahir
8	20/06/2020	II	Kesimpulan dengan jurnal.	J. Tahir
9		II		J. Tahir
10		II	Ale Betajar.	J. Tahir



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No.17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 ; Fax : (0435) 82997
E-mail : lembagapenlitian@unisan.ac.id

Nomor : 099/ULG-G/III/2020

LAMPIRAN : -

HAL : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Sekertaris dewan Kabupaten Gorontalo Utara.

Di-

Kabupaten Gorontalo Utara

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Rahmisyari ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Kepala Lemlit

Meminta Kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan
Proposal/Skripsi, Kepada :

Nama Peneliti : ARIYANTO TAHIR

NIM : S2116152

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Lokasi Penelitian : DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Demikian permohonan ini, atas Kebijakan dan Kerja samanya di ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kusnadanupaya No.2 Komp. Blok plan Desa molingkapoto Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

REKOMENDASI PENELITIAN

NO: 175/Set-DPRD/ VII/2020

Berdasarkan Surat Universitas Ichsan Gorontalo, Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan Nomor : 099/UIG-G//III/2020 Tanggal 08 Maret 2020 Perihal Izin Moneliti, maka dengan Kami dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ARIANTO TAHIR
NIM : 0927128301
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara terkait Judul Penelitian tersebut dialas.

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, Juli 2020



Skripsi_APRIYANTO TAHIR_S.21.16.152_PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	didisuryadi94.blogspot.com Internet Source	5%
3	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	2%
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
5	sosiopublika.wordpress.com Internet Source	2%
6	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	manusiastandar.wordpress.com Internet Source	1%

9	mohammadfadlyassagaf.wordpress.com Internet Source	1 %
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
11	id.scribd.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1 %
13	moyajanganmoyan.blogspot.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	es.scribd.com Internet Source	<1 %
17	tomatajangnebo.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
19	myirfanhidayat.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	adoc.tips Internet Source	<1 %
21	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
22	stiekhad.ac.id Internet Source	<1 %
23	edoc.pub Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
25	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0364/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ARIYANTO TAHIR
NIM : S2116152
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten Gorontalo utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan

CURICULUM VITAE



A. Identitas

Nama	:Ariyanto Tahir
Nama Panggilan	: Manto
Nim	:S2116152
Tempat Tanggal Lahir	:kwandang, 4 November 1996
Jenis Kelamin	:Laki-Laki
Angkatan Ketiga	:Tahun 2016
Fakultas	:Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	:Ilmu Pemerintahan
Status	:Mahasiswa karyawan
Agama	:Islam
Alamat	:Desa Ombuladata
Nama Ayah	:ismail tahir
Nama Ibu	:Halima Buka
Jumlah Saudara Kandung	:2 Orang
Nama adik	: 1. Wahyu tahir 2. Shintia Tahir

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Pontolo Tahun 2009
2. SMP 8 Satu Atap Kwandang Tahun 2012
3. SMA Negeri 5 Kwandang Tahun 2015